

**KRISIS EKONOMI TURKI 2019-2024
STUDI KASUS : SANKSI AS DAN EROPA TERHADAP EKONOMI TURKI**

Tamara Angela¹, Christian Johan De Fretes², Roberto Octavianus Cornelis Seba³

^{1,2,3} Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sosial, Universitas Kristen Satya
Wacana, Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga 50711
Email: 372021056@student.uksw.edu; christian.defretes@uksw.edu; robert.seba@uksw.edu

Submitted: 18-05-2025; Accepted: 17-06-2025; Published : 19-06-2025

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai dampak dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa terhadap Turki yang akan di analisa dalam rentang waktu 2019-2024. Pendekatan kualitatif deskriptif yang disertai studi kasus akan digunakan untuk menyoroti hubungan interdependensi ekonomi antara Turki dengan kedua pihak tersebut, penelitian ini akan berfokus terhadap dampak perekonomian Turki setelah diterimanya ketiga sanksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketiga sanksi memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas perekonomian Turki hal ini dikarenakan negara Turki sendiri memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap negara-negara tersebut sehingga penerimaan sanksi menimbulkan penurunan ekonomi yang cukup signifikan dan bahkan sempat menyebabkan inflasi tinggi hingga stagnasi ekonomi berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi ekonomi sebagai pisau analisisnya sebagai landasan untuk memperkuat bahwa ketergantungan dalam perekonomian dapat menjadi suatu titik rapuh bagi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan evaluatif guna mengantisipasi atau menyusun strategi penanganan permasalahan ekonomi yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata kunci: Politik Ekonomi; Sanksi Internasional; Ekonomi Turki; Sanksi Amerika; Krisis Ekonomi

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi berkepanjangan yang tengah dihadapi oleh Turki, yang sebagian besar disebabkan oleh sanksi internasional yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dalam konteks ini, Turki menjadi contoh konkret bagaimana intervensi eksternal dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kestabilan perekonomian suatu negara, terutama ketika negara tersebut memiliki tingkat keterikatan ekonomi dan diplomatik yang tinggi dengan pihak pemberi sanksi. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pertama pada tahun 2018, mata uang nasional Turki, yakni Lira, langsung mengalami depresiasi yang sangat tajam. Situasi ini menjadi indikasi awal dari gejolak ekonomi yang lebih besar yang akan terus berkembang dalam beberapa tahun berikutnya. Pada sanksi-sanksi lanjutan yang diberikan oleh pihak Barat, tekanan terhadap ekonomi Turki semakin memburuk, tercermin dari terus menurunnya stabilitas makroekonomi serta indikator ekonomi seperti tingkat inflasi dan nilai tukar.

Intervensi eksternal seperti sanksi ekonomi akan semakin berdampak ketika negara yang menjadi target memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap negara-negara mitra, baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun teknologi. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan struktural yang membuat negara lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika terjadi pergesekan politik atau perbedaan kepentingan dalam ranah internasional. Dalam kasus Turki, kedekatannya secara historis, geopolitik, dan ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa serta Amerika Serikat menjadikannya sangat terdampak oleh kebijakan sanksi yang dijatuhkan. Akibatnya, efek dari sanksi tersebut tidak hanya bersifat simbolis atau diplomatik, melainkan sangat nyata dan menyentuh langsung sektor ekonomi riil. Bahkan, inflasi di Turki sempat melonjak drastis dan mencapai titik tertinggi sebesar

85,5% pada tahun 2022 (APNews, 2024), sebuah angka yang mencerminkan krisis ekonomi dalam skala besar.

Hingga saat ini, masih sangat terbatas kajian akademik yang secara spesifik membahas mengenai dampak langsung dari sanksi-sanksi internasional, khususnya yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, terhadap perekonomian nasional Turki. Padahal, dalam lima tahun terakhir, sanksi tersebut terbukti memiliki pengaruh besar yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kestabilan fiskal dan moneter negara tersebut. Lebih jauh, masih belum banyak studi yang mengulas secara mendalam bagaimana pemerintah Turki melalui kebijakan domestiknya, khususnya kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga oleh Bank Sentral, berusaha merespons dan menanggulangi tekanan tersebut. Upaya-upaya seperti pemotongan atau kenaikan suku bunga, intervensi pasar, dan reformasi kebijakan fiskal sejauh ini menjadi instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah gelombang tekanan global dan dinamika politik yang terus berubah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif dinamika perekonomian Turki dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, yakni masa di mana dampak sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai dirasakan secara luas. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi dalam menganalisis bagaimana sanksi internasional dapat memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, serta menelaah bagaimana kebijakan domestik, terutama dalam bidang moneter dan fiskal, dapat berperan penting dalam mengendalikan dampak negatif tersebut. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara politik global, ketergantungan ekonomi, serta strategi penyesuaian kebijakan domestik dalam mempertahankan kestabilan ekonomi nasional di tengah kondisi krisis yang kompleks dan multidimensional.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam krisis ekonomi yang terjadi di Turki selama periode 2019 hingga 2024, dengan fokus pada dampak sanksi internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Untuk menjawab fokus kajian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Metode kualitatif deskriptif dipilih karena pendekatan ini dianggap paling tepat dalam menggambarkan situasi kompleks yang melibatkan hubungan internasional, kebijakan politik, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi secara menyeluruh, mendalam, dan kontekstual sesuai dengan kondisi lapangan, tanpa memanipulasi variabel yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengamati fenomena ekonomi Turki, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika politik luar negeri dan relasi kekuatan global.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, di mana Turki dijadikan sebagai satu kasus yang dianalisis secara mendalam. Studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti menelusuri berbagai aspek dari krisis ekonomi Turki dalam konteks sanksi internasional, termasuk sejarah hubungan bilateral, kebijakan luar negeri, serta respon-respon domestik dari pemerintah dan lembaga keuangan Turki. Studi kasus dalam penelitian ini memberikan fokus pada aspek spesifik yang belum banyak diteliti, sehingga dapat membuka ruang untuk temuan baru. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dua komponen utama, yaitu unit amatan dan unit analisis. Unit amatan dalam penelitian ini adalah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika dan Uni Eropa terhadap Turki selama kurun waktu 2018 hingga 2024. Sanksi-sanksi ini menjadi titik tolak dalam menelusuri berbagai dampak lanjutan yang dirasakan oleh perekonomian Turki.

Sementara itu, unit analisis dalam penelitian ini adalah kondisi perekonomian Turki yang mengalami stagnasi atau krisis dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Unit analisis ini menjadi fokus utama kajian, di mana peneliti berusaha memahami bagaimana serangkaian tekanan eksternal yang bersifat politik dan ekonomi memberikan pengaruh terhadap stabilitas ekonomi domestik Turki. Melalui metode ini, peneliti berharap dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap krisis ekonomi Turki, bukan hanya dari sisi data ekonomi makro, tetapi juga dari sisi relasi internasional yang membentuk dan mempengaruhi arah kebijakan dalam negeri negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Turki dengan Amerika dan Uni Eropa

Hubungan bilateral Turki dengan Amerika telah dimulai sejak abad ke-19, kerjasama mereka ditandai dengan ditandatanganinya *Treaty of Commerce and Navigation* pada tahun 1830 (Gordon, 1928). Hubungan ini terus berkembang sejak Ottoman hingga menjadi Republik Turki. Bukti dari kuatnya kerjasama kedua negara dapat dilihat dari partisipasi Turki dalam Perang Korea Selatan dengan Korea Utara, dimana saat itu Turki memihak kepada Korea Selatan yang mana adalah sekutu dari Amerika, hal ini juga menjadi penanda akan keseriusan Turki dalam keanggotaannya untuk bergabung bersama NATO pada tahun 1952 (European Union, n.d). Selain itu, pangkalan udara Incirlik yang dibangun tahun 1955 juga menjadi simbol kerja sama militer strategis anatara Turki dengan Amerika (Incirlik Air Base, 2018), selain militer kerja sama ini juga menjadi kerja sama sementara secara ekonomi, dimana Turki menjadi eksportir besar logam, suku cadang kendaraan, dan peralatan industri ke Amerika Serikat.

Sedangkan untuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa baru dimulai pada tahun 1959, dimana saat itu Turki mendaftarkan diri untuk bergabung dengan *European Economic Community* (EEC). Pada tahun 1963, Perjanjian Ankara disepakati, pada pertemuan ini Uni Eropa memberikan Turki sebuah status mitra resmi (European Union, 1995). Lalu, pada tahun 1995, Turki masuk ke dalam Uni Pabean yang memperkuat ekspor industri, tekstil, dan makanan olahan (EU Policy Trade, 2024). Data menunjukkan peningkatan tajam volume perdagangan Turki-UE, yang menjadikan EU mitra dagang utama Turki (Deutsche Institut, 2024). Namun, status Turki sebagai non-anggota UE menciptakan suatu ketergantungan tanpa kontrol kebijakan dagang.

Pemberian ketiga sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Turki telah memberikan dampak yang nyata, mendalam, dan sangat signifikan terhadap kestabilan ekonomi negara tersebut. Sanksi-sanksi ini, meskipun tidak diberlakukan secara bersamaan dalam satu waktu, diterapkan dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Hal ini menciptakan tekanan yang bersifat berkelanjutan dan bertumpuk terhadap struktur makroekonomi nasional, mengganggu jalannya pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan stabilitas (Bernando, J. S, 2023). Ketika negara mengalami tekanan ekonomi dari luar yang bersifat sistematis dan bertahap, seperti dalam kasus Turki ini, maka yang terjadi bukan hanya gangguan sesaat, tetapi juga kerentanan jangka panjang terhadap fondasi ekonomi domestik.

Hubungan Bilateral Turki dengan Amerika dan Uni Eropa

Hubungan bilateral Turki dan Amerika telah dimulai sejak abad ke-19, ditandai dengan ditandatanganinya Treaty of Commerce and Navigation pada tahun 1830 (Gordon, 1928). Hubungan ini terus berkembang hingga era Republik Turki, termasuk partisipasi Turki dalam Perang Korea dan keanggotaannya dalam NATO pada tahun 1952 (European

Union, n.d). Pangkalan udara Incirlik yang dibangun tahun 1955 menjadi simbol kerja sama militer strategis (Incirlik Air Base, 2018), sementara secara ekonomi, Turki menjadi eksportir besar logam, suku cadang kendaraan, dan peralatan industri ke Amerika Serikat.

Kerja sama Turki dan Uni Eropa dimulai sejak 1959 ketika Turki mendaftarkan diri untuk bergabung dengan *European Economic Community* (EEC). Tahun 1963, Perjanjian Ankara disepakati, memberikan Turki status mitra resmi (European Union, 1995). Pada 1995, Turki masuk ke dalam Uni Pabean yang memperkuat ekspor industri, tekstil, dan makanan olahan (EU Policy Trade, 2024). Data menunjukkan peningkatan tajam volume perdagangan Turki-UE, yang menjadikan UE mitra dagang utama Turki (Deutsche Institut, 2024). Namun, status Turki sebagai non-anggota UE menciptakan ketergantungan tanpa kontrol kebijakan dagang.

Tiga Sanksi Ekonomi dan Dampaknya

Sanksi Pertama (2018 oleh AS)

AS menjatuhkan sanksi atas penahanan Andrew Brunson, seorang pendeta Kristen yang dituduh terlibat organisasi teroris oleh pemerintah Turki. Penangkapan ini memicu ketegangan diplomatik. AS menjatuhkan sanksi ekonomi dengan menaikkan tarif impor baja 50% dan aluminium 20% dari Turki, menyebabkan nilai Lira jatuh 18% (bareksa, 2018). Dua menteri Turki dikenai sanksi personal, yang akhirnya dicabut setelah Turki membebaskan Brunson (BBC, 2018; VOA Indonesia, 2018).

Sanksi Kedua (2020 oleh AS)

Turki membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia demi meningkatkan keamanan wilayah, tetapi tindakan ini melanggar standar NATO dan memicu sanksi berdasarkan CAATSA (Michael R Pompeo, 2020). Turki dikeluarkan dari proyek jet tempur F-35 dan dikenai pembatasan ekspor militer serta pinjaman lembaga internasional (Defense News, 2019). Sanksi tersebut merupakan

respons dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap pembelian sistem pertahanan S-400 buatan Rusia oleh pemerintah Turki—sebuah langkah yang dipandang menantang kepentingan geopolitik NATO. Di saat yang sama, konflik berkepanjangan di wilayah Laut Mediterania Timur semakin memperburuk relasi Turki dengan Uni Eropa. Ketegangan diplomatik ini turut memicu ketidakpastian pasar, yang pada akhirnya menyebabkan arus modal asing keluar dari negara tersebut dalam jumlah besar. Penurunan aliran investasi asing langsung dan investasi portofolio memperlemah ketahanan ekonomi nasional dan berkontribusi pada depresiasi nilai tukar lira secara lebih lanjut. Pada tahun 2023, nilai lira menyentuh rekor terendah sebesar TRY 20,12 per dolar AS, sebuah angka yang menjadi simbol krisis kepercayaan yang mendalam terhadap stabilitas ekonomi Turki (CNBC Indonesia, 2023).

Sanksi Ketiga (2020 oleh Uni Eropa)

Sanksi UE berkaitan dengan konflik Turki-Yunani tentang delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Mediterania. Turki menandatangani nota maritim dengan Libya yang melintasi wilayah klaim Yunani, menyebabkan kemarahan UE (Straturka, 2025). Turki dituduh melakukan pengeboran ilegal dan dua pejabat Turkish Petroleum dikenai pembekuan aset dan pelarangan visa (Harneys, 2020; VOA Indonesia, 2020). UE sempat mempertimbangkan sanksi tambahan namun ditunda setelah diplomasi Erdoğan (Eureporter, 2021).

Stagnasi Ekonomi Turki dan Tanggapannya

Rangkaian sanksi dan konflik geopolitik membuat Turki mengalami penurunan tajam pada nilai mata uangnya, inflasi tinggi, dan penurunan arus investasi asing. Nilai Lira sempat anjlok 40% terhadap USD (Kompas, 2021), dan menyentuh rekor TRY 20,12 per USD pada 2023 (CNBC Indonesia, 2023). Inflasi mencapai 85,5% pada 2022, tertinggi dalam 25 tahun terakhir

(tirto.id, 2023), dengan sektor pendidikan mengalami inflasi 120% (TUIK, 2024).

Pemerintah Turki menanggapi krisis dengan menaikkan suku bunga acuan secara drastis dari 8,5% menjadi 50% pada 2024 (Hafiyyan, 2024; AP News, 2024). Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Meski mampu menekan inflasi menjadi 47,5%, dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dan investasi tetap besar. Stabilitas belum tercapai sepenuhnya. Sanksi pertama yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 menjadi titik awal dari krisis nilai tukar lira yang dramatis. Lira anjlok sebesar 40% terhadap dolar Amerika Serikat, suatu kondisi yang mencerminkan penurunan drastis dalam kepercayaan pasar global dan investor asing terhadap kemampuan pemerintah Turki untuk mengelola perekonomiannya secara efektif (Kompas, 2021). Pelemahan nilai tukar ini tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat secara langsung, tetapi juga meningkatkan beban utang luar negeri, terutama karena sebagian besar pinjaman sektor swasta dan publik denominasi dolar. Hal ini menimbulkan efek domino yang kemudian menyulitkan stabilitas fiskal negara.

Analisa dengan Teori Liberalisme Interdependensi Ekonomi

Menurut Keohane dan Nye (1977), negara-negara dalam sistem internasional saling bergantung dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Ketergantungan ini mendorong kerja sama dan cenderung menghindari konflik. Namun, studi kasus Turki menunjukkan bahwa ketegangan politik dapat memicu sanksi ekonomi dan mengganggu stabilitas dalam negeri secara sistemik.

Sanksi terhadap Turki membuktikan bahwa ketergantungan terhadap negara mitra seperti AS dan UE menimbulkan risiko tinggi saat hubungan memburuk. Turki tidak dapat menghindari dampak dari ketegangan politik karena tingkat interdependensi yang tinggi, sementara status politiknya di luar keanggotaan penuh UE membuatnya tidak memiliki kontrol

atas keputusan strategis yang memengaruhi perekonomiannya sendiri.

Sebagai respons terhadap tekanan multidimensional tersebut, pemerintah Turki melalui Bank Sentral memilih untuk menerapkan kebijakan moneter yang sangat ketat dengan menaikkan suku bunga secara drastis dalam beberapa tahap. Dari suku bunga awal sebesar 8,5%, kemudian dinaikkan menjadi 15%, dan pada akhirnya mencapai level ekstrem sebesar 50% pada tahun 2024. Kebijakan ini diambil dalam upaya untuk mengendalikan inflasi yang sempat menyentuh titik tertinggi dalam sejarah modern Turki, yaitu 85,5% (Haffiyan, 2024). Inflasi setinggi ini memberikan tekanan luar biasa pada sektor rumah tangga dan dunia usaha, sehingga kebijakan pengetatan moneter dipandang sebagai langkah penting untuk memulihkan kredibilitas otoritas moneter dan mengembalikan stabilitas harga.

Meskipun langkah ini menuai banyak kritik, terutama karena berisiko menekan aktivitas konsumsi dan investasi domestik, namun hasilnya menunjukkan adanya perbaikan. Inflasi berhasil ditekan hingga turun ke angka 47,5% pada akhir 2024, yang menandakan keberhasilan relatif dari strategi tersebut. Selain menurunkan tekanan inflasi, kebijakan ini juga dinilai memperkuat kredibilitas Bank Sentral Turki di mata investor global, serta mendorong masyarakat untuk kembali mempercayai dan menggunakan mata uang lokal sebagai alat simpanan dan transaksi. Meningkatnya preferensi terhadap lira di tengah krisis adalah sebuah sinyal positif bagi pemulihan ekonomi domestik, walaupun langkah ini masih harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang hati-hati dan reformasi struktural yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang teoritis, dinamika yang dialami oleh Turki dalam beberapa tahun terakhir memberikan contoh konkret atas validitas teori Liberalisme Interdependensi Ekonomi yang dikembangkan oleh Keohane dan Nye (1977). Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan ekonomi antarnegara, maka semakin besar pula kemungkinan kerja sama yang terjalin di antara

mereka. Namun pada saat yang sama, ketergantungan tersebut juga membuka celah bagi negara-negara kuat untuk menggunakan tekanan ekonomi sebagai instrumen politik luar negeri. Dalam konteks Turki, hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa baik dari segi perdagangan, investasi, maupun kerja sama pertahanan yang sebelumnya menjadi kekuatan, justru berubah menjadi titik rawan ketika terjadi konflik kepentingan.

Ketika sanksi dijatuhkan, ketergantungan ekonomi ini berubah menjadi sumber kerentanan. Efek domino dari pembatasan akses terhadap pasar internasional, teknologi, sistem keuangan global, serta kepercayaan investor menciptakan krisis ekonomi dalam negeri yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan domestik. Situasi ini menggarisbawahi bahwa dalam era globalisasi, stabilitas ekonomi suatu negara tidak hanya bergantung pada kondisi internal, tetapi juga pada hubungan eksternal yang kompleks, dinamis, dan saling mempengaruhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Turki telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menimbulkan efek sistemik yang memicu apa yang dapat disebut sebagai “krisis perekonomian Turki”. Krisis ini merupakan konsekuensi dari tekanan ekonomi dan politik yang saling berkaitan, serta menunjukkan bagaimana intervensi eksternal dalam bentuk sanksi dapat mengguncang stabilitas makroekonomi suatu negara.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam era globalisasi dan sistem internasional yang saling terhubung, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya bersifat independen. Setiap negara, termasuk Turki, memiliki ketergantungan dalam berbagai aspek terhadap

negara lain, baik dalam bidang perdagangan, investasi, keamanan, maupun diplomasi. Ketergantungan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam teori liberalisme interdependensi ekonomi, tidak hanya menciptakan peluang kerja sama, tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan baik dari sisi politik, ekonomi, maupun stabilitas hubungan bilateral dan multilateral.

Meskipun ketegangan utama dalam kasus ini terjadi antara Turki dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dampaknya meluas hingga memengaruhi persepsi global terhadap stabilitas ekonomi Turki. Banyak investor asing mulai meragukan prospek keuntungan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di negara tersebut, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan dan memperburuk arus modal masuk. Di sisi lain, upaya pemerintah Turki untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi patut diapresiasi. Namun demikian, pemulihan ekonomi secara mandiri di tengah tekanan eksternal yang kuat tidak dapat dicapai secara instan. Proses ini membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta stabilitas politik yang mendukung.

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Turki ke depan adalah bagaimana membangun kembali hubungan yang stabil dan konstruktif dengan mitra strategis utamanya, yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagai langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan investor dan memperkuat kembali fondasi ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- AA.com.tr. (2020, 28 Agustus). Yunani ratifikasi kesepakatan maritim dengan Mesir.
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/yunani-ratifikasi-kesepakatan-maritim-dengan-mesir/1955730>
- AA.com.tr. (2020, 28 November). Kesepakatan maritim dan militer Turki ubah nasib Libya.
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/kesepakatan-maritim-dan-militer-turki-ubah-nasib-libya/2058587>

- [nasib-libya/2058587](https://www.aa.com.tr/id/dunia/kesepakatan-maritim-dan-militer-turki-ubah-nasib-libya/2058587)
- Al Jazeera. (2020, 14 Desember). US sanctions NATO ally Turkey over Russian missile defence. Al Jazeera.
<https://www.aljazeera.com/news/2020/12/14/us-sanctions-nato-ally-turkey-over-russian-missile-defence>
- AP News. (2024, 21 Maret). Turkey's central bank unexpectedly hikes interest rate to 50% amid soaring inflation. AP News.
<https://apnews.com/article/turkey-central-bank-interest-rate-cut-ca1b3732bd09724cc50ae688711f24a3>
- Bareksa. (2018, 14 Agustus). Krisis Turki dan Dampaknya terhadap Pasar Modal. Bareksa.com.
<https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2018-08-14/krisis-turki-dan-dampaknya-terhadap-pasar-modal>
- Bernando, J. S. (2023). Erdoganisme: Kebangkitan, Krisis, dan Pergulatannya (R. Yus, Ed.). IRCISOD.
- BBC News Indonesia. (2019, 3 April). Mengapa Turki dan Amerika Serikat bersitegang soal Fethullah Gulen?
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47786219>
- BBC News. (2020, 14 Desember). US sanctions Turkey over S-400 missile system. BBC.
<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55311099>
- CNBC Indonesia. (2023, 30 Mei). Lira Turki hancur-lebur, tapi bukan yang terburuk di dunia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230530113831-128-441740/lira-turki-hancur-lebur-tapi-bukan-yang-terburuk-di-dunia>
- CNN Indonesia. (2024, 23 Oktober). Sejarah permusuhan ulama Turki Fethullah Gulen dan Erdogan.
<https://www.cnnindonesia.com/internal/20241023154021-120-1158823/sejarah-permusuhan-ulama-turki-fethullah-gulen-dan-erdogan>

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Defense News. (2019, Juli 18). Turkey officially kicked out of F-35 program. <https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/>
- Delegasi Uni Eropa untuk Turki. (2021, 28 September). The European Union and Türkiye. EEAS. https://www.eeas.europa.eu/turkey/european-union-and-turkey_en?s=230#main-content
- DetikFinance. (2023, Mei 29). Naik turun ekonomi Turki di era kepemimpinan Erdogan yang jadi presiden lagi. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6745144/naik-turun-ekonomi-turki-di-era-kepemimpinan-erdogan-yang-jadi-presiden-lagi>
- Erarslan, A. (2024, 10 September). Education inflation: Why school expenses have skyrocketed in 2024?. Türkiye Today. <https://www.turkiyetoday.com/lifestyle/education-inflation-why-school-expenses-have-skyrocketed-in-2024-51220/>
- EUR-Lex. (1995). Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council. [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1995/1\(5\)/oj/eng#document1](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj/eng#document1)
- European Commission. (n.d.). Türkiye. European Commission. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/turkiye_en
- European Union. (n.d.). 1990–99: A Europe without frontiers. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1990-99_en
- Gordon, L. J. (1928). The economic basis of peace. *The American Political Science Review*, 22(3), 711–721. <https://www.jstor.org/stable/1945626?seq=1>
- Hafiyyan. (2024, 22 Maret). Bank Sentral Turki Kerek Suku Bunga hingga 50%, Buntut Lonjakan Inflasi 70%. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240322/620/1751738/bank-sentral-turki-kerek-suku-bunga-hingga-50-buntut-lonjakan-inflasi-70>
- Hamidi. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hanifisanto, R. T. (2019). Sanksi Ekonomi sebagai Upaya Perlindungan Warga Negara dalam Pandangan Hukum Internasional (Studi Kasus Amerika Serikat - Turki 2018). *Jurist-Diction*, 2(6), 2235–2248. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15951>
- Harneys. (2020, 9 Maret). EU sanctions two Turkish executives. *Harneys.com*. <https://www.harneys.com/our-blogs/regulatory/eu-sanctions-two-turkish-executives/>
- Ihalauw, J. J. O. I. (2003). *Bangunan teori*. Salatiga: Fakultas Ekonomi, UKSW.
- Investopedia. (n.d.). Stagnation. <https://www.investopedia.com/terms/s/stagnation.asp>
- Jones, L. (2015). *Societies under siege: Exploring how international economic sanctions (do not) work*. Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Turki. (n.d.). Relations with European Countries. <https://www.mfa.gov.tr/relations-with-european-countries.en.mfa>
- Keohane, R., & Nye, J. (1977). *Power and interdependence*. Little, Brown and Company.
- Kinasih, S. (2023, 16 Maret). Rapor Merah Ekonomi Turki di Bawah Erdogan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/rapor-merah-ekonomi-turki-di-bawah-erdogan-gDwj>
- Kompas. (2021, Desember 4). Lira Turki anjlok lebih dari 40 persen setahun, kok bisa? <https://money.kompas.com/read/2021/12/04/161512226/lira-turki-anjlok-lebih-dari-40-persen-setahun-kok-bisa>
- Kontan. (2021, September 24). Shell akan pasok LNG ke Turki dalam 10 tahun.

- Kontan.
<https://internasional.kontan.co.id/news/shell-akan-pasok-lng-ke-turki-dalam-10-tahun>
- Lockheed Martin. (n.d.). F-35 Lightning II.
<https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35.html>
- Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). Relations with European countries.
<https://www.mfa.gov.tr/relations-with-european-countries.en.mfa>
- Saral, M. (2017). Turkey's 'Self' and 'Other' Definitions in the Course of the EU Accession Process. <https://ms.persian-books.sk/book/29763637/8906da/turkeys-self-and-other-definitions-in-the-course-of-the-eu-accession-process.html>
- Shaw, M. N. (2017). International law. Cambridge University Press.
- SindoNews. (2018, August 17). Trump ancam Turki dengan sanksi besar jika tak bebaskan pastor AS. SINDOnews. <https://international.sindonews.com/berita/1325424/42/trump-ancam-turki-dengan-sanksi-besar-jika-tak-bebaskan-pastor-as>
- Straturka. (2025). An EEZ with Türkiye would accelerate Syria's economic recovery. <https://www.straturka.com/an-eez-with-turkiye-would-accelerate-syrias-economic-recovery/>
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suroso, P. C. (1993). Perekonomian Indonesia: Buku panduan mahasiswa.
- Tempo.co. (n.d.). Turki minta Amerika ekstradisi Fethullah Gulen dan 83 pendukung. <https://www.tempo.co/internasional/turki-minta-amerika-ekstradisi-fethullah-gulen-dan-83-pendukung-795331>
- Tempo.co. (2018, November 22). Sengkarut sengketa Turki dan Yunani di Laut Mediterania. <https://www.tempo.co/arsip/sengkarut-sengketa-turki-dan-yunani-di-laut-mediterrania-586757>
- Trading Economics. (n.d.). Turkey Inflation Rate. <https://tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi>
- VOA Indonesia. (2020, Februari 28). Terlibat pengeboran ilegal di Siprus, pejabat Turki dikenai sanksi Uni Eropa. <https://www.voaindonesia.com/a/terlibat-pengeboran-ilegal-di-siprus-pejabat-turki-dikenai-sanksi-uni-eropa/5308048.html>
- World Bank. (2021). GDP per capita (current US\$) – Turkiye. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations=TR&start=2018>
- Wray, L. R., & Dantas, F. (Eds.). (2022). Handbook of economic stagnation. Academic Press